

RINGKASAN

Debi Sifkhatul Azmi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial, Ekonomi Dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dosen Pembimbing I : Dr. Sukirno, S.H., M.Si., dan Dosen Pembimbing II : Kartika Winkar Setya, S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam pembinaan Desa Wisata Karangtengah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah memiliki dasar hukum yang memadai dalam pembinaan desa wisata. Pelaksanaan pembinaan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas belum berjalan optimal dan berkelanjutan. Berbagai bentuk pembinaan, seperti penguatan kelembagaan, pendampingan, peningkatan kualitas produk wisata, pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, sosialisasi regulasi, dan pemberian penghargaan, sebagian besar hanya dilakukan pada tahap awal pembentukan desa wisata dan tidak dilaksanakan secara konsisten. Berdasarkan teori peran Soejono Soekanto, pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan perannya sebagai pembina desa wisata.

Faktor pendukung pembinaan meliputi adanya regulasi yang lengkap, potensi wisata alam, budaya, dan religi yang dimiliki Desa Karangtengah, serta komitmen pemerintah desa melalui pembentukan kelembagaan pengelola desa wisata. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsep desa wisata, kurangnya regenerasi pengelola, dan rendahnya minat generasi muda untuk terlibat karena pengelolaan desa wisata belum mampu memberikan penghasilan yang memadai dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah Daerah, Desa Wisata

SUMMARY

Debi Sifkhatul Azmi, Law Study Program, Faculty of Social, Economics, and Humanities, Nahdlatul Ulama University, Purwokerto. Supervisor I: Dr. Sukirno, S.H., M.Sc., and Supervisor II: Kartika Winkar Setya, S.H., M.H.

This study aims to analyze the role of the Banyumas Regency Government in developing the Karangtengah Tourism Village and identify supporting and inhibiting factors. The research used an empirical legal method with data obtained through interviews and literature review.

The results indicate that the Banyumas Regency Government has an adequate legal basis for developing the tourism village. Implementation of this development by the Banyumas Regency Youth, Sports, Culture, and Tourism Office has not been optimal and sustainable. Various forms of development, such as institutional strengthening, mentoring, improving the quality of tourism products, developing human resources, marketing, disseminating regulations, and awarding awards, were mostly only carried out in the initial stages of tourism village development and were not implemented consistently. Based on Soejono Soekanto's role theory, the local government has not fully implemented its role as a village tourism developer.

Supporting factors for development include comprehensive regulations, the potential for natural, cultural, and religious tourism in Karangtengah Village, and the village government's commitment through the establishment of a village tourism management institution. Meanwhile, inhibiting factors include low public awareness of the concept of village tourism, a lack of managerial regeneration, and low interest among the younger generation in getting involved because village tourism management has not yet generated adequate and sustainable income.

Keywords: *Role, Local Government, Village Tourism.*